

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Basah, Sjahran, *Pencabutan Izin Sebagai Suatu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH Universitas Airlangga, 1995)
- Efendi, Jonaedi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana 2016)
- Hadjon, Phillipus Mandiri, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- Handoko, Widhi, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Araria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jaarta: Djambatan, 2008)
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005)
- Kartodidjo, Sartono dan Joko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia : Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991)
- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: FH Unpad, 2000)
- Marbun, SF, dkk, *Hukum Administrasi Negara/ Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII Press, 2001)
- Matutu, Mustamin Dg., *Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Sulaiman, King Faisal, *Dialektika Pengujian Pengujian Peraturan Pasca Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebiiijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005)

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Widarta, I, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001)

Jurnal

Apriyana, Nana, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan Studi Kasus di Pulau Jawa*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2011

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2015-2017*, Magelang: BPS, 2018

Mawardi, Ikhwanuddin, *Kajian Pembentukan Kelembagaan Untu Pengendalian Konversi dan Pengembangan Lahan, Peran dan Fungsinya*, Jakarta: Jurnal Teknik Lingkungan, 2006

Rokhim, Abdul, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”, Malang: FH Unisma, 2013

Winarsi, Sri, *Wewenang Pertanahan di Era Otonomi*, Jurnal Yuridika, 2008

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang Berfungsi Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah

Data Elektronik

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://www.bnbp.go.id>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2018

Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sejarah>, Diakses pada 24 Mei 2018 pukul 12.14 WIB

Badan Pusat Statistik: Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, <https://www.bps.go.id>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2018

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018>, Diakses pada 22 Maret 2018

<https://internasional.kompas.com/read/2009/12/04/1828289/alih.fungsi.lahan.pertanian.capai.lima.hektar.per.tahun>, Diakses pada 26 Maret 2018

Parlindungan, Andi Putra, *Administrasi Pertanahan*, https://www.academia.edu/12301506/Administrasi_Pertanahan, Diakses pada 26 November 2018

Wahyuni, Ridha, *Kebijakan Agraria di Sektor Pertanahan, Kehutanan, pertambangan, dan Migas*, <https://uniridha.blogspot.co.id/2013/05/kebijakan-agraria-disektor-pertanahan.html?m=1>, diakses pada 1 Desember 2018